

INKLUSI di Nusa Tenggara Barat (NTB)

NO - ONE IS LEFT BEHIND



INKLUSI bekerja sama dengan 6 organisasi masyarakat sipil dan jaringan mereka di Nusa Tenggara Barat (NTB) – Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), Institut Lingkaran Pendidikan Alternatif Perempuan (KAPAL Perempuan), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam), Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant CARE), Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), dan Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) – untuk memajukan pekerjaan mereka untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan, berpartisipasi dalam pembangunan, dilindungi dari kekerasan, dan berpartisipasi dalam perekonomian. Mitra-mitra masyarakat sipil tersebut juga mengadvokasi dan berkolaborasi dengan lembaga pemerintahan untuk memastikan bahwa bukti, pembelajaran, dan pengalaman kelompok-kelompok marginal didengar dan dipertimbangkan saat proses pembuatan keputusan dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat.



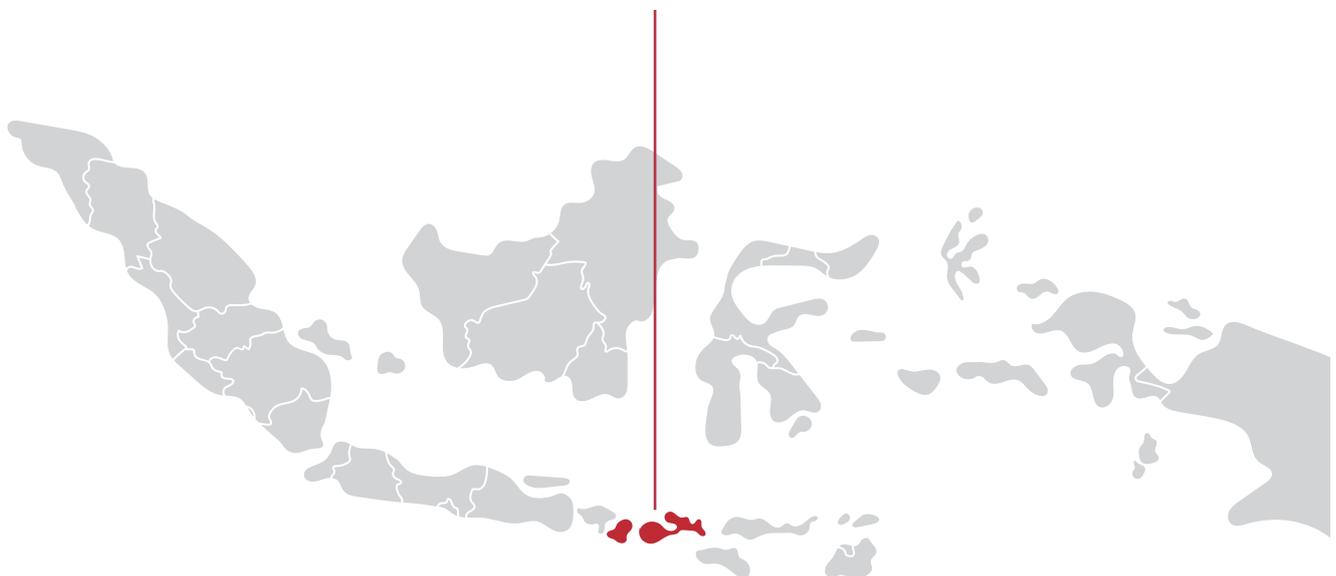
6 organisasi masyarakat sipil



4 kabupaten



57 desa



Migrant CARE – Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat



Anggota koperasi usaha perempuan DESBUMI membuat tas toyoban. Migrant CARE mendukung migran perempuan yang telah kembali pulang dan pensiun untuk mengembangkan kehidupan alternatif.
Foto: Migrant CARE

Migrant CARE mengadvokasi kebijakan dan regulasi internasional dan domestik untuk memperkuat perlindungan untuk pekerja migran Indonesia, mencegah perdagangan manusia, dan memastikan akses program perlindungan sosial.

Migrant CARE bekerja sama dengan Disnaker di tingkat kabupaten dan dinas yang bertanggung jawab untuk perlindungan pekerja migran (BP2MI) serta beberapa lembaga pemerintah lainnya untuk memenuhi hak-hak tersebut melalui **inisiatif DESBUMI**. Pusat Layanan **Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI)** membantu migrasi legal, penanganan laporan dan rujukan, serta memfasilitasi akses kepada layanan dan program pemerintah. Hal ini termasuk cakupan BPJS Ketenagakerjaan yang baru-baru ini diperluas.

NTB adalah salah satu dari empat wilayah pengirim pekerja migran tertinggi di Indonesia. INKLUSI mendukung **Migrant CARE di 8 desa di Lombok Tengah** untuk memberikan layanan DESBUMI, membentuk dan melatih kelompok pekerja migran dan kelompok usaha, serta mengadvokasi regulasi desa dan pendanaan untuk melindungi pekerja migran.

Di Lombok Tengah, dinas koperasi, perindustrian, dan perdagangan (Koperindag) telah mendirikan **koperasi usaha kecil perempuan DESBUMI (kooperasi)**. Hal ini memungkinkan didirikannya koperasi untuk mantan pekerja migran perempuan dan pekerja migran perempuan yang telah pensiun di desa-desa DESBUMI. Kelompok usaha DESBUMI telah diundang untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan Koperindag di tingkat kabupaten untuk menjual produk lokal mereka dan telah mendapatkan pelatihan *digital marketing* dari Tokopedia untuk memperluas akses perempuan kepada pasar daring.

Pusat Rehabilitasi YAKKUM

Pusat Rehabilitasi YAKKUM (PR YAKKUM) berupaya untuk memajukan hak-hak dasar penyandang disabilitas psikososial untuk mengakses layanan, berpartisipasi dengan setara dan sepenuhnya dalam pembuatan keputusan pembangunan, dan dilindungi dari kekerasan.

PR YAKKUM bertujuan untuk mengurangi institusionalisasi para penyandang disabilitas psikososial dengan membangun kesadaran, penerimaan, dan mengembangkan kapasitas keluarga, komunitas, dan pemerintah untuk menyediakan rehabilitasi berbasis komunitas. PR YAKKUM juga terlibat dengan para penyedia pekerjaan, Unit Layanan Disabilitas (ULD) dan penyedia program pemberdayaan kehidupan untuk mengurangi hambatan dan membuka akses terhadap ketenagakerjaan inklusif dan kewiraswastaan inklusif.

LIDI Foundation, mitra lokal PR YAKKUM menerapkan **Program DIGNITY** mereka untuk memperkuat kebijakan dan kapasitas lokal hingga nasional dalam inklusi disabilitas di 2 desa: **Jeraing** dan **Selebung Ketangga** di **Lombok Timur**



PR YAKKUM memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional 2023
Foto: PR YAKKUM



KAPAL Perempuan menggelar Musrenbang Perempuan untuk mendukung pembangunan desa inklusif.
Foto: KAPAL Perempuan

KAPAL Perempuan bekerja sama dengan **LPDSM yang merupakan mitra lokal mereka di 6 desa di Lombok Timur dan 7 desa di Lombok Utara** untuk memberdayakan perempuan dan anak perempuan yang terpinggirkan untuk mengadvokasi hak-hak mereka termasuk kebebasan dari kekerasan dan perkawinan anak.

KAPAL Perempuan memberdayakan perempuan melalui pendidikan di **Sekolah Perempuan**, sebuah sekolah informal untuk perempuan. Anggota sekolah tersebut mendapatkan pelatihan untuk memulai usaha-usaha kecil, menangani laporan tentang perlindungan sosial melalui layanan Pos Pengaduan mereka dan terlibat dengan pemerintah lokal melalui konsultasi Musyawarah Perempuan Daerah. Untuk membantu masyarakat, LPDSM bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mengembangkan perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender dan disabilitas, memperkuat layanan terpadu untuk pengentasan kemiskinan (UTP), dan mendanai kegiatan melalui unit koperasi (*Kabang Kerjasama*).

Di Lombok Utara, LPDSM bekerja secara kolektif dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil, lembaga adat, dan pemerintah lokal untuk mencegah dan menghapuskan perkawinan anak, perkawinan paksa, dan bentuk kekerasan lainnya terhadap perempuan dan anak.

Hal-hal tersebut dan pembelajaran lainnya terkait pengembangan **Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)** disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Darmawati saat beliau berkunjung ke Lombok pada bulan Oktober 2023. DRPPA, yang merupakan inisiatif bersama Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Desa, sedang diterapkan secara bertahap di desa-desa di seluruh Indonesia.

Lakpesdam PBNU – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Institut Lakpesdam di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) berupaya untuk meningkatkan kesadaran dampak dan pencegahan perkawinan anak di Indonesia. **Lakpesdam** dan **Fatayat Lombok Utara** bekerja di **6 desa di Lombok Utara**.

Lakpesdam dan Fatayat Lombok Utara sedang berkonsultasi dengan lembaga pemerintah lokal termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya-upaya kolaboratif untuk mencegah perkawinan anak yang dimulai pada tahun 2024. Para pihak tersebut akan bekerja untuk mendukung penerapan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Hal ini termasuk melalui penilaian dasar mengenai prevalensi dan faktor pendorong perkawinan anak serta meningkatkan partisipasi perempuan yang berarti dalam proses tata kelola di tingkat desa dan kabupaten.

PEKKA – Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga



Wisuda Akademi Paradigma PEKKA
Foto: PEKKA

PEKKA beroperasi melalui **PEKKA Union** yang merupakan cabang lokal mereka di **5 desa di Lombok Timur** dan **8 desa di Lombok Barat** untuk meningkatkan penghidupan rumah tangga yang dikepalai perempuan dan kelompok marginal.

Akademi Paradigma PEKKA memberikan pelatihan kepemimpinan, advokasi kebijakan, dan pengembangan usaha untuk memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam rapat desa (musrenbangdes). Di rapat desa, perempuan dapat melakukan advokasi untuk mengatasi kesenjangan dalam akses kepada identitas hukum, perlindungan sosial, dan layanan lainnya dan untuk mendapatkan dukungan untuk usaha-usaha PEKKA. Lebih dari 270 perempuan telah lulus dari angkatan pertama di Lombok Timur dan Lombok Barat pada bulan Mei 2023. Setelah lulus, banyak perempuan telah mendirikan berbagai usaha PEKKA untuk mendukung penghidupan mereka. Hal ini termasuk **koperasi ekonomi**, **PEKKA Produksi**, **PEKKA Mart**, dan **bank sampah**. Anggota bank sampah menerima penghasilan dari industri dan usaha lokal untuk pengumpulan dan daur ulang sampah.

PEKKA telah menerima umpan balik positif dari kepala desa yang berkomitmen mendukung Akademi untuk mendirikan usaha-usaha mikro dan kecil, mengembangkan kapasitas, mengakses anggaran desa, dan mengakses bahan baku.



Kelompok konstituen BaKTI menggelar diskusi Reses Partisipatif tentang pembangunan inklusif. Foto: BaKTI

Mitra lokal BaKTI, yaitu **Lombok Research Centre (LRC)**, beroperasi di **15 desa** di **Lombok Timur**. LRC menerapkan inisiatif konsultasi desa **Reses Partisipatif** BaKTI untuk kelompok marginal. LRC membentuk kelompok konstituen yang terdiri dari laki-laki, perempuan, dan penyandang disabilitas yang terpilih, yang bertemu dengan pemerintah dan anggota parlemen selama reses parlemen. Para anggota mengadvokasi akses terhadap layanan penting, program ketenagakerjaan dan ekonomi, serta perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perkawinan anak.

LRC bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mendukung pendirian dan pengoperasian Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). UPTD PPA kabupaten didukung oleh implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), regulasi dan pendanaan lokal, akan membantu memastikan mekanisme perlindungan. Mekanisme perawatan dan pemulihan korban tersedia dan aksesibel di Lombok Timur.

Anggota kelompok konstituen yang merupakan penyandang disabilitas juga bekerja sama dengan pemerintah untuk mengumpulkan data dan menyusun regulasi **Desa Inklusif** dan mengadvokasi pendanaan kabupaten untuk menjadikan layanan dan program pemerintah lebih aksesibel.

Bekerja secara kolektif untuk mendorong inklusi disabilitas



Mitra masyarakat sipil INKLUSI bekerja secara kolektif dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memperkuat kewarganegaraan inklusif untuk para penyandang disabilitas di Lombok.

Mitra bekerja sama dengan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat di bawah naungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), jaringan disabilitas, dan pemangku kepentingan utama lainnya untuk menyiapkan **Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD) NTB**.

Mitra terlibat dengan DPRD NTB dan Dinas Sosial dalam penyusunan **Peraturan Regional Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas**. Rancangan Peraturan Daerah telah menerima masukan dari Komisi Nasional Disabilitas (KND) dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas serta sedang didiskusikan di DPRD.

Mitra berkolaborasi dengan **Dinas Tenaga Kerja** untuk mendukung pendirian dan pengoperasian **Unit Layanan Disabilitas (ULD)**. Unit layanan disabilitas akan membangun hubungan lebih kuat antara pemerintah, industri, dan organisasi-organisasi penyandang disabilitas untuk mendorong ketenagakerjaan yang adil dan kondisi bekerja serta peluang kewirastwastaan untuk para penyandang disabilitas di Lombok.

Bekerja secara kolektif untuk mencegah perkawinan anak



Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi perkawinan anak melalui **Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak**. Regulasi baru telah menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menikah menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia minimal laki-laki.

Di NTB, 6 Mitra masyarakat sipil INKLUSI dan jaringan mereka bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan KUA, Dinas Pendidikan, Dinas Pembangunan Desa, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk mencerminkan ilmu pengetahuan lokal dan pendekatan lokal dalam rancangan **Strategi Daerah Rancangan Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (Strada RAD PPA)**.

Strategi kedaerahan akan memperkuat pengawasan dan pencatatan kasus-kasus terdaftar dan tidak terdaftar, meningkatkan pelaporan pada target nasional, dan mendukung pendekatan yang diinformasikan bukti di bidang-bidang utama: mengembangkan kapasitas anak dan pemuda; menciptakan lingkungan budaya yang kondusif untuk mencegah perkawinan anak; meningkatkan aksesibilitas dan perluasan layanan termasuk layanan kesehatan, pendidikan, dan penanganan kasus; mendukung ketahanan ekonomi keluarga, dan memperkuat regulasi dan kapasitas kelembagaan di NTB.

NO-ONE IS LEFT BEHIND

Tidak Ada Satupun yang Tertinggal

INKLUSI
Kemitraan Australia - Indonesia
Menuju Masyarakat Inklusif

Kemitraan Australia-Indonesia Menuju Masyarakat yang Inklusif, atau INKLUSI, berupaya meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok marginal dalam, dan manfaat dari, pembangunan sosio-budaya, ekonomi, dan politik Indonesia. INKLUSI bekerja dengan pemerintah dan mitra-mitra masyarakat sipil untuk memajukan pekerjaan mereka dalam kesetaraan gender, hak-hak penyandang disabilitas, dan inklusi sosial. INKLUSI mendukung agenda Pemerintah Indonesia untuk inklusi, termasuk melalui prioritas pembangunan nasional dan Sustainable Development Goals. INKLUSI adalah program Pemerintah Australia yang berlangsung selama 8 tahun (2021-2029) dengan anggaran mencapai 120 juta AUD. Program ini bermitra dengan 11 organisasi masyarakat sipil, 9 lembaga mitra riset serta jaringan mereka di 32 provinsi, 129 kabupaten dan kota, serta 650 desa di Indonesia.

KONTAK

 info@inklusi.or.id

 www.inklusi.or.id